

ANALISIS PROBLEMATIKA DAN UPAYA PELESTARIAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA ASN MUDA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Bere Ali

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Kaltim
bereal1959@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika dan upaya pelestarian nilai-nilai Pancasila pada aparatur sipil negara (ASN) muda di Provinsi Kalimantan Timur. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan kuesioner kepada 40 orang responden ASN peserta Latsar tahun 2021 serta wawancara dengan 10 orang tokoh di Kalimantan Timur sebagai narasumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan ASN muda ada kecenderungan tidak kuat. ASN muda yang hidup di era reformasi hanya menguasai Pancasila secara teori. Mereka juga taat dalam menjalankan ajaran agama sebagai pengamalan nilai Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Tetapi mereka lemah dalam praktek pengamalan sila kedua, ketiga, keempat dan kelima. Pengamalan sila kedua dengan indikator kesediaan membantu orang lain atau tolong menolong tidak menjadi kebiasaan ASN muda. Pengamalan sila ketiga dengan indikator kesediaan bela negara masih lemah. Pengamalan sila keempat dengan indikator sikap dalam musyawarah menunjukkan bahwa ASN muda tidak siap jika ada orang yang menolak pendapatnya. Pengamalan sila kelima dengan indikator keikutsertaan dalam kegiatan gotong royong belum diamalkan oleh ASN muda.

ASN muda ragu-ragu dan tidak yakin (15%) bahwa Pancasila bisa bertahan di tengah-tengah gempuran ideologi asing. ASN muda juga ragu-ragu dan tidak yakin (25%) bahwa peristiwa G30S 1965 didalangi oleh PKI. Dari kalangan generasi tua memiliki pandangan yang sangat kuat bahwa Pancasila tidak bisa digantikan oleh ideologi apapun. Mereka cukup khawatir dengan pengamalan Pancasila oleh ASN muda. Oleh karena itu perlu segera dilaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada ASN muda agar memiliki karakter Pancasila. Saran kepada BPIP untuk segera mengoordinasikan pelaksanaan diklat pembentukan karakter nilai-nilai Pancasila di kalangan ASN muda.

Kata kunci: Pelestarian Pancasila, Aparatur Sipil Negara.

ANALYSIS OF PROBLEMS AND EFFORTS TO PRESERVE PANCASILA VALUES IN YOUNG ASN IN EAST KALIMANTAN PROVINCE

ABSTRACT

This study aims to analyze the problems and efforts to preserve Pancasila values in young state civil servants (ASN) in East Kalimantan Province. The methodology used is a qualitative approach with questionnaires to 40 ASN respondents participating in the 2021 Latsar and interviews with 10 prominent figures in East Kalimantan as resource persons.

The results showed that the practice of Pancasila values among young ASN had a weak tendency. Young ASN who lived in the reform era only mastered Pancasila in theory. They are also obedient in carrying out religious teachings as the practice of the values of the first precepts of the One Supreme Godhead. But they are weak in the practice of practicing the second, third, fourth and fifth precepts. The practice of the second precept with an indicator of willingness to help others or to help does not become a habit for young ASN. The practice of the third precept with indicators of willingness to defend the country is still weak. The practice of the fourth precept with attitude indicators in deliberation shows that young ASNs are not ready if someone rejects their opinion. The practice of the fifth precept with indicators of participation in mutual cooperation activities has not been practiced by young ASN.

Young ASN are doubtful and unsure (15%) that Pancasila can survive amidst the onslaught of foreign ideologies. Young ASN are also doubtful and unsure (25%) that the 1965 G30S incident was masterminded by the PKI. The older generation has a very strong view that Pancasila cannot be replaced by any ideology. They are quite worried about the practice of Pancasila by young ASN. Therefore, it is necessary to immediately carry out education and training for young ASN so that they have the character of Pancasila. Suggestions to BPIP to immediately coordinate the implementation of training and education for the formation of Pancasila values among young ASN.

Keywords: *Preservation of Pancasila, State Civil Apparatus.*

I. PENDAHULUAN

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah ujung tombak pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Tugas pokok mereka berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 adalah pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Sehingga dapat dikatakan bahwa ASN adalah pemerintah. Setiap ASN telah ditetapkan tugas pokok sesuai keahlian yang dimiliki. Mereka bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok kepada atasan secara berjenjang. ASN muda dalam penelitian ini adalah mereka yang belum berusia tujuh tahun pada peristiwa reformasi tahun 1998.

Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila, maka secara otomatis ASN dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat harus dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Perilaku ASN baik sebagai pejabat struktural, fungsional maupun pelaksana dalam memberikan pelayanan harus selalu dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial. Banyak pejabat maupun pelaksana yang tidak menyadari peran pelestarian nilai-nilai Pancasila tersebut. Korupsi, kolusi dan nepotisme adalah perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Demikian juga tentang penyimpangan perilaku seperti tidak disiplin, tidak ramah, lambat dalam memberikan pelayanan dan sebagainya.

ASN sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 adalah: "...pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah". Selanjutnya pada ayat (2): "Pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan". Dengan demikian ASN memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu ASN harus memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN berdasarkan Pancasila.

Dewasa ini muncul kekhawatiran bahwa Pancasila tidak lagi dirawat dengan baik. Pancasila tidak lagi berkembang bersama Indonesia dalam menyongsong masa depannya. Cara pandang masyarakat awam terhadap pelaksanaan Pancasila tercermin dalam perilaku pejabat dan ASN. Hasil pra penelitian melalui teknik wawancara dengan salah seorang tokoh menyatakan bahwa *"Dulu ketika masih sekolah mulai SD sampai bangku kuliah, kuat anggapan bahwa semua pejabat 100% Pancasilais. Setelah tamat kuliah dan bekerja sebagai PNS/guru sampai menduduki jabatan eselon tiga di kabupaten, ia melihat fenomena ada pejabat dan PNS yang tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti KKN, bersumpah tapi tidak ditepati, tidak agamis, tidak jujur, tidak disiplin, tidak melayani masyarakat tapi melayani atasan, tidak adil, dan berbagai perilaku menyimpang lainnya. Akhirnya ia berkesimpulan bahwa banyak pejabat dan PNS yang tidak Pancasilais. Lalu ia mundur dari PNS dan ingin menjaga Pancasila melalui ranah politik. Lalu ia masuk partai politik,*

singkat cerita ia kemudian terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten. Dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD, ia berjuang untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan keputusan. Di sini ia menyatakan gagal karena selalu berhadapan dengan teman-temannya yang jauh dari nilai-nilai Pancasila. Akhirnya beliau menyimpulkan bahwa 90% pejabat tidak Pancasila-lais”.

Inti dari fenomena di atas adalah bahwa ada masalah yang diperankan oleh pejabat negara dan ASN dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya. Perilaku ASN seperti itu akan dicontoh oleh masyarakat, sehingga masyarakat pun semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak lagi menjadi pandangan hidup, tidak lagi menginspirasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Atas dasar itu, maka permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah: (1) Apa saja problematika pengamalan Pancasila oleh ASN muda? (2) Apa upaya peningkatan kapasitas ASN muda dalam upaya pelestarian nilai-nilai Pancasila?

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan fenomena problematika dan upaya pelestarian nilai-nilai Pancasila di kalangan ASN. Teknik yang digunakan adalah kuesioner dan wawancara (*interview*), dengan instrumen kunci (*key instrument*) adalah penulis sendiri. Adapun responden dalam penelitian ini adalah:

1. Para CPNS peserta Latsar Prov. Kaltim tahun 2021 sebanyak 40 orang yang dirandom dari 456 orang ASN muda, yaitu: (a) Pemprov. Kaltim 12 orang, (b) Kota Samarinda 5 orang, (c) Kota Balikpapan 4 orang, (d) Kabupaten Berau 6 orang, (e) Kabupaten Paser 4 orang, (f) Kabupaten Mahulu 3 orang, (g) Kabupaten Kukar 2 orang, (h) Kabupaten Kutim 3 orang, (i) Kabupaten Kubar 1 orang. Mereka juga dirandom berdasarkan unit kerja, sehingga setiap unit kerja diwakili 1 (satu) orang. Dengan demikian, maka 40 responden tersebut berasal dari 40 unit kerja yang tersebar pada 8 (delapan) kabupaten/kota dan Pemerintah Prov. Kaltim.
2. Para tokoh pemerintahan, tokoh pendidik, dan tokoh masyarakat Kaltim sebagai narasumber sebanyak 10 (sepuluh) orang, yaitu: Kepala BPSDM, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda, Kepala Kesbangpol, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala BKD, Rektor IKIP PGRI Kaltim, Dekan FIP IKIP PGRI Kaltim, Dekan FPIPS IKIP PGRI Kaltim, Widyaiswara Ahli Utama BPSDM, dan Wartawan Senior Kaltim Post.

Ada dua jenis data yang dianalisis yaitu hasil isian kuesioner dari responden dan hasil wawancara dengan narasumber. Lalu kedua data dan informasi tersebut dianalisis secara terpadu untuk mengetahui kondisi sesungguhnya tentang problematika dan upaya pelestarian Pancasila di kalangan ASN muda.

III. HASIL PENELITIAN

Data Masalah Pengamalan Pancasila pada ASN Muda

Data menunjukkan bahwa ASN muda menguasai Pancasila secara teori. Hal ini dibuktikan dengan kelulusan mereka 100% pada Latsar CPNS di mana di dalamnya ada materi tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Data praktek pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sebagai berikut: Pengamalan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dengan indikator ketaatan menjalankan agama dan kepercayaan dengan hasil: taat beribadah sebanyak 34 orang (85%), kurang taat 4 orang (10%), dan tidak taat 2 orang (5%). Pengamalan sila kedua dengan indikator ikut serta dalam membantu korban bencana: selalu membantu 2 orang (5%), kadang-kadang 10 orang (25%), tidak pernah 28 orang (70%). Pengamalan sila ketiga dengan indikator kesediaan mengikuti diklat kader bela negara: bersedia 4 orang (10%), ragu-ragu 27 orang (67,5%), tidak bersedia 9 orang (22,5%). Pengamalan sila keempat dengan indikator sikap dalam musyawarah jika pendapatnya tidak diterima orang banyak: benci dengan mereka sebanyak 3 orang (7,5%), kecewa 27 orang (67,5%), menerima pendapat orang banyak 10 orang (25%). Pengamalan sila kelima dengan indikator keikutsertaan dalam kegiatan gotong royong: selalu ikut bergotong royong di lingkungan sebanyak 8 orang (20%), pernah ikut 6 orang (15%), tidak pernah 26 orang (65%).

Selain indikator tersebut di atas, ASN muda juga ditanya tentang kemampuan Pancasila bertahan di tengah gempuran ideologi asing dan peristiwa G30S/PKI, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1

Keyakinan ASN Muda Tentang Kemampuan Pancasila Bertahan Terhadap Gempuran Ideologi Asing dan Peristiwa G30S/PKI

No.	Indikator	Yakin	Ragu-Ragu	Tidak Yakin	Ket.
1.	Pancasila bisa bertahan di tengah gempuran ideologi asing	34 (85%)	2 (5%)	4 (10%)	
2.	Peristiwa 30 September 1965 didalangi oleh PKI	30 (75%)	3 (5%)	8 (20%)	

Sumber: diolah dari kuesioner, 2021

Data Pelestarian Nilai-Nilai Pancasila

Data pelestarian nilai-nilai Pancasila bersumber dari hasil wawancara dengan para tokoh Kaltim mencakup dua indikator yaitu: (1) apakah ada kemungkinan Indonesia memiliki ideologi lain selain Pancasila di masa depan?

dan (2) apakah ASN perlu diberikan Pendidikan dan Pelatihan tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila?

Adapun hasil wawancara indikator pertama: apakah ada kemungkinan Indonesia memiliki ideologi lain selain Pancasila di masa depan? diperoleh data sebagai berikut:

Kepala BPSDM Prov. Kaltim Nina Dewi (ND) menyatakan:

“Tidak bisa, karena Pancasila merupakan pemersatu dan perekat bangsa yang sudah tertuang dari sila pertama sampai dengan sila kelima Pancasila”.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Jauhar Efendi (MJE) yaitu sebagai berikut:

”Secara umum sulit untuk memiliki ideologi selain Pancasila, karena ideologi Pancasila sudah disepakati oleh para pendiri Negara Indonesia. Tetapi secara parsial, kelompok-kelompok atau individu-individu bisa saja terjadi. Apalagi di perkembangan teknologi informasi, sehingga media memiliki pengaruh yang besar terhadap karakter seseorang”.

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur Sufian Agus (SA) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Jika melihat latar belakang perjuangan kemerdekaan dan Kebhinnekaan Bangsa Indonesia. Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 dan hingga kini setelah mencapai 76 tahun merdeka, Idiologi Pancasila mampu mempersatuan Bangsa dan Negara Indonesia yang beraneka ragam, baik dari segi suku, agama, bahasa, tempat dan adat istiadat. Pengalaman sejarah telah membuktikan, pemberontakan yang bertujuan untuk mengganti Pancasila dengan idiologi lain baik yang berhaluan kiri, yakni Partai Komunis Indonesia (PKI). Maupun haluan kanan, yaitu Negara Islam Indonesia dan Darul Islam dengan Tentara Islam Indonesia (NII/DI-TII). Kedua upaya untuk mengganti Pancasila itu ternyata gagal, karena sebagian besar Rakyat Indonesia tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indoneaia (NKRI) yang mampu mengayomi seluruh anak bangsa dengan latar belakang yang berbeda-beda. Namun bukan tidak mungkin, Pancasila berganti dengan idiologi lain tetapi dengan konsekwensi disintegrasi bangsa. Indonesia mungkin bisa bubar jika Pancasila berganti, karena keberagaman yang ada di Indonesia akan berpotensi pemisahan diri dari sejumlah daerah untuk membentuk negara sendiri”.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Anwar Sanusi (AS) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Tidak bisa, karena Pancasila sudah teruji dan terbukti sebagai satu-satunya ideologi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Segala ideologi yang menyimpang dari Pancasila harus ditumpas dari bumi Indonesia”.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Didy Rusdiansyah (DR) menyatakan:

”Pancasila sudah cukup sebagai ideologi negara”.

Praktisi pendidikan yaitu Rektor IKIP PGRI Kalimantan Timur Suriansyah Hage (SH) menyatakan bahwa:

“Indonesia itu terdiri dari berbagai agama, suku, budaya dan bahasa sehingga tidak ada ideologi yang bisa menyatukan itu selain Pancasila, oleh karena memang Pancasila pada saat dijadikan sebagai dasar negara sudah melalui proses dan perdebatan yang sangat panjang serta melibatkan banyak tokoh-tokoh di dalamnya”.

Widyaiswara ahli utama BPSDM Provinsi Kalimantan Timur Muchlis Syahrani (MS) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Tidak bisa, ideologi selain Pancasila berarti pembubaran NKRI”.

Dekan FPIPS IKIP PGRI Kalimantan Timur Abdul Rozak Fahrudin (ARF) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Tidak, karena Pancasila sudah merupakan kesepakatan bersama sebagai ideologi negara”.

Tejo Suparno (TS) selaku Dekan FIP IKIP PGRI Kalimantan Timur mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Pancasila sebagai dasar negara adalah harga mati, yang mempersatukan NKRI”.

Terakhir pendapat yang dikemukakan oleh Sjarifuddin Hs (SHs) wartawan senior Kaltim sebagai berikut:

“Andaikan itu bisa, ya tetap gak perlu lagi. Pancasila sudah lebih dari cukup. Bahkan ekasila saja berwujud sila yang pertama saja sudah cukup. Maknanya, bila setiap individu di negara ini taat dan patuh menaikan dan mengamalkan perintah Tuhan dan ajaran agamanya dengan sebenar-benarnya, sejahtera dan makmurlah negeri yang permai ini”.

Adapun hasil wawancara indikator kedua yaitu: apakah ASN perlu diberikan Pendidikan dan Pelatihan tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila? diperoleh data sebagai berikut:

Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Timur (ND) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Perlu, untuk memberikan pengetahuan supaya lebih memahami nilai-nilai Pancasila yang selayaknya sudah menjadi kewajiban setiap warga negara Indonesia”.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Pemprov Kaltim (MJE) sebagai berikut:

”Perlu. Supaya para ASN mau mencermati kembali tentang pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai ASN”.

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur (SA) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Jajaran ASN menjadi pihak yang berada di garis depan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia kerja maupun lingkungan masyarakat. Karena tingkah laku dan sikap ASN menjadi salah satu tolok ukur bagi masyarakat sekitar. Karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi ASN untuk terus dipupuk tentang nilai-nilai Pancasila, seiring dengan perkembangan zaman yang terus berubah, sehingga memiliki potensi ancaman yang kian kompleks untuk mempertahankan keutuhan Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945, sebagai dasar dan Falsafah Bangsa Indonesia untuk selamanya”.

Selanjutnya (AS) selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timurmengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Di awal jabatannya sebagai ASN yaitu pada saat Pendidikan Prajabatan setiap ASN selalu diberi materi tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu ketika dalam perjalanan karirnya pengamalan Pancasila cukup dilakukan dengan cara pengamatan dan pemantauan dalam perilaku sehari-hari. Penghargaan dan sanksi bagi ASN dalam mengemban tugas sudah diatur dengan jelas”.

Narasumber (DR) selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang salah satu tugasnya adalah mengelola administrasi kepegawaian mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

”Masih tetap diperlukan dengan metode pengajaran yang lebih baik lagi”.

Terhadap hal yang sama (SH) selaku Rektor IKIP PGRI Kalimantan Timur mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Pada saat mau menjadi ASN wajib diberikan Pendidikan dan Pelatihan tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila. Setelah bekerja minimal setiap 5 tahun sekali perlu penyegaran dalam penguatan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila itu. Pada saat mau purna tugas perlu diberikan penguatan tentang penting penghayatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat”.

Adapun pendapat widyaiswara ahli utama BPSDM Kalimantan Timur (MS) adalah sebagai berikut:

“Perlu diklat khusus tentang Pancasila seperti masa lalu dengan penataran. Kiranya kewajiban 20 jamlat per tahun bagi setiap ASN bisa dialokasikan 10% atau 2 jamlat tentang kepancasilaan”.

Adapun pendapat (ARF) selaku Dekan FPIPS IKIP PGRI Kalimantan Timur sebagai berikut:

“Iya”

Teman sejawatnya (TS) selaku Dekan FIP IKIP PGRI Kalimantan Timur mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Sangat perlu. ASN harus peka terhadap kondisi yang berkembang di masyarakat, ASN wajib memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai dasar berbangsa dan bernegara”.

Terakhir pada bagian ini adalah pendapat (SHs) selaku wartawan senior di Kalimantan Timur, berpendapat sebagai berikut:

“Masih sangat perlu. Bahkan menurut saya, selain dijejali ceramah dalam kelas, perlu juga minimal sebulan penuh mereka digembleng ala pendidikan calon prajurit militer agar ada pembentukan karakter yang berdisiplin tinggi dan seroja (sehat rohani dan jasmani)”.

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan data di atas, bahwa ASN muda yang hidup di era reformasi hanya menguasai Pancasila secara teori. Mereka juga taat dalam menjalankan ajaran agama sebagai pengamalan nilai Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Tetapi mereka lemah dalam praktek pengamalan sila kedua, ketiga, keempat dan kelima. Pengamalan sila kedua dengan indikator kesediaan membantu orang lain atau tolong menolong tidak menjadi kebiasaan ASN muda. Padahal karakter utama bangsa Indonesia adalah tolong menolong sesama warga negara. Apabila ada warga yang kesusahan maka warga lain ikut membantu walaupun bukan keluarga dekat. Ini merupakan dampak individualitas yang semakin tampak di kalangan generasi muda. Relasi mereka tidak lagi ada di sekitar tempat tinggal tetapi ada di media sosial.

Pengamalan sila ketiga dengan indikator kesediaan bela negara masih lemah. Banyak di antara mereka yang tidak bersedia menjadi kader bela negara padahal konsep pertahanan Indonesia adalah Hankamrata (pertahanan keamanan rakyat semesta). Pertahanan negara tidak hanya menjadi tanggungjawab TNI dan Polri akan tetapi menjadi tanggungjawab bersama seluruh rakyat Indonesia.

Pengamalan sila keempat dengan indikator sikap dalam musyawarah menunjukkan bahwa ASN muda tidak siap jika ada orang yang menolak pendapatnya. Ini pertanda bahwa ego mereka sangat dominan baik dilandasi oleh ego perorangan maupun ego kelompok atau golongan. Ketidaksiapan dalam menerima pendapat orang lain akan berdampak pada adanya perpecahan, sehingga muncul kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat. Kelompok-kelompok ini rawan ditunggangi oleh pihak lain yang ingin memecahbelah persatuan Indonesia. Pengamalan sila kelima dengan indikator keikutsertaan dalam kegiatan gotong royong belum diamalkan oleh ASN muda. Keadilan adalah adanya sikap kesetiakawanan sosial antara sesama warga bangsa. Misalnya kesediaan bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong adalah kemauan bekerjasama dalam mengerjakan sesuatu. Gotong royong dan kerjasama ini masih belum kuat di kalangan ASN muda.

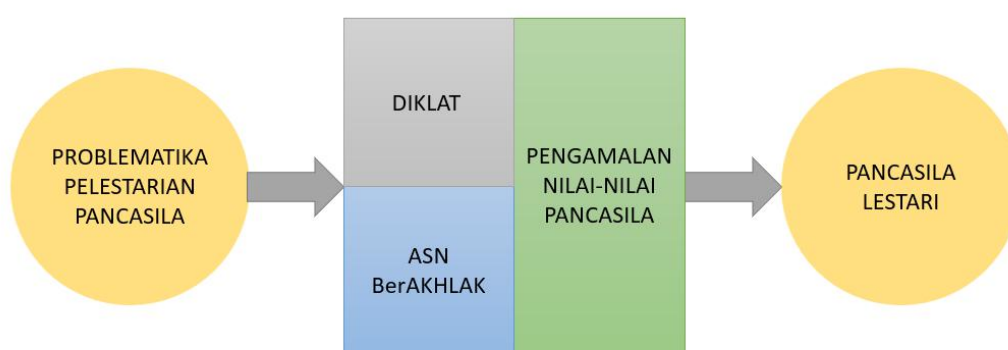
ASN muda selaku modal insani dalam pembangunan bangsa beda dengan generasi sebelumnya. Mereka sudah ada yang ragu dan tidak yakin (15%) bahwa Pancasila bisa bertahan di tengah-tengah gempuran ideologi asing. Kelompok ini tidak mempersoalkan jika Indonesia tidak lagi memiliki ideologi Pancasila. Jika tidak segera diantisipasi, maka angka ini akan terus membesar, dan pada gilirannya Pancasila akan hilang dari bumi Indonesia. Dan ketika Indonesia tidak lagi memiliki karakter Pancasila maka sama saja dengan Indonesia telah bubar. Dan ini yang menjadi incaran negara-negara lain yang ingin menguasai Indonesia yang kaya raya ini. Saat ini negara-negara lain berlomba untuk menguasai Indonesia dalam upaya memenuhi kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan dalam negerinya.

Salah satu penyebab lunturnya karakter Pancasila di kalangan ASN muda adalah keyakinan terhadap sejarah Indonesia terutama terkait dengan peristiwa G30S/PKI. Sudah banyak di antara mereka (25%) yang ragu dan tidak yakin bahwa peristiwa G30S didalangi oleh PKI. Hal ini bisa saja disebabkan oleh konten-konten media sosial yang bernuansa pelurusan sejarah G30S. Padahal bukti-bukti cukup kuat bahwa G30S didalangi oleh PKI. Angka tersebut cukup mengkhawatirkan. Faktor penyebabnya adalah internal dan eksternal. Faktor internal adalah akibat kurangnya diklat tentang ke-Pancasila-an dalam tiga dasawarsa terakhir. Pengetahuan mereka hanya diperoleh di bangku sekolah melalui pelajaran PPKn atau PSPB yang intensitasnya rendah. Sedangkan faktor eksternal adalah globalisasi akibat kemajuan teknologi informasi. Propaganda dari luar yang mereka terima dinilai lebih meyakinkan sehingga merubah cara pandang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari kalangan generasi tua yang diwakili oleh para narasumber memiliki pandangan yang sangat kuat bahwa Pancasila tidak bisa digantikan oleh ideologi apapun. Mereka cukup khawatir dengan pengamalan Pancasila oleh ASN muda. Oleh karena itu mereka menganggap perlu segera dilaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada ASN muda agar memiliki karakter Pancasila. Satu di antaranya adalah Suriansyah Hage (Rektor IKIP PGRI Kalimantan Timur) menegaskan bahwa “Indonesia itu terdiri dari berbagai agama, suku, budaya dan bahasa sehingga tidak ada ideologi yang bisa menyatukan itu selain Pancasila, oleh karena memang Pancasila pada saat dijadikan sebagai dasar negara sudah melalui proses dan perdebatan yang sangat panjang serta melibatkan banyak tokoh-tokoh di dalamnya”. Ini adalah penegasan sejarah bahwa Indonesia terbentuk bersamaan dengan dasar negaranya yaitu Pancasila. Perdebatan untuk menemukan rumusan Pancasila itu tidak mudah, karena mencari intisari dari karakter bangsa Indonesia yang merupakan memori kebaikan dari semua suku bangsa di nusantara ini. Oleh karena itu Pancasila harus terus menerus dilestarikan. Perlunya upaya pelestarian nilai-nilai Pancasila dikhususkan kepada ASN karena sebagai abdi negara, ASN harus mampu menjadi contoh bagi warga lain di lingkungan tempat tinggal masing-masing, tentang bagaimana menjalankan kehidupan bertetangga berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, maka upaya

pelestarian nilai-nilai Pancasila harus melalui diklat yang dilaksanakan secara massif sesuai dengan kondisi kekinian. Peningkatan kapasitas ASN tidak hanya melalui diklat, tetapi yang perlu diperhatikan adalah pengamatan dan perilaku sehari-hari. Di sini peran pimpinan cukup strategis. Bilamana ada ASN melakukan perilaku yang buruk artinya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, harus mendapatkan sanksi.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka melalui penelitian ini dapat dibuat sintesis sebagai berikut:



Gambar 1: Pola Sintesis Temuan Hasil Penelitian

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Pendidikan dan pelatihan adalah cara yang tepat membentuk ASN agar optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Diklat ASN sudah memiliki landasan hukum yang kuat yaitu UU Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Kepala LAN (Perkalan) Nomor 10 Tahun 2018. Setiap ASN disediakan diklat Latsar untuk CPNS, diklat fungsional, diklat PKP, PKA, PKN, dan berbagai jenis diklat lainnya. Ada diklat yang dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara diklat, dan adapula yang diselenggarakan secara mandiri oleh instansi (*in-house training*). Diklat-diklat tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ASN agar memiliki kemampuan teknik, manajerial, sosiokultural, dan pemerintahan.

Dalam kurikulum Latsar, PKP, PKA, dan PKN diagendakan materi pelestarian nilai-nilai Pancasila seperti: sikap dan perilaku bela negara, nasionalisme, wawasan kebangsaan, etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Sedangkan diklat-diklat lainnya tidak diagendakan materi ke-Pancasila-an. Dari segi frekuensi ini belum cukup sebab seseorang hanya mendapatkan materi ke-Pancasila-an maksimal sebanyak lima kali yaitu: Latsar saat menjadi CPNS, PKP saat menduduki jabatan eselon IV, PKA saat menduduki jabatan eselon III, PKN II saat menduduki jabatan eselon II, dan PKN I saat menduduki jabatan eselon I. Bila seseorang hanya sampai menduduki jabatan eselon IV, maka selama menjadi PNS hanya mendapatkan materi ke-Pancasila-an sebanyak dua kali yaitu saat Latsar dan PKP. Dari sisi frekuensi ini belum cukup untuk membentuk seseorang agar benar-benar Pancasila dalam melaksanakan tugasnya.

Terkait dengan diklat ke-Pancasila-an ini, sangat diharapkan peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk bekerjasama dengan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mendisain dan melaksanakan diklat-diklat tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila. Dengan diklat yang demikian, maka ASN memiliki karakter yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila serta berkemampuan yang memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

ASN BerAKHLAK

ASN BerAKHLAK adalah *core value* ASN yang telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021. Pada waktu yang bersamaan juga diluncurkan *employer branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa”. Keduanya adalah nilai-nilai dasar bagi ASN. Presiden menegaskan bahwa setiap ASN harus memegang teguh satu nilai dasar dan semboyan yang sama.

Nilai ASN BerAKHLAK merupakan akronim dari: **B**erorientasi pelayanan, **A**kuntabel, **K**ompeten, **H**armonis, **L**oyal, **A**daptif, dan **K**olaboratif.

Berorientasi pelayanan artinya setiap ASN harus siap memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat Indonesia. ASN harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Di sini ASN harus memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, dan memberikan pelayanan dengan cepat, tepat, cekatan, solutif dan dapat diandalkan.

Akuntabel artinya bertanggungjawab atas kepercayaan yang telah diberikan oleh negara kepadanya. ASN harus mampu melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab, jujur, disiplin, berintegritas, sehingga tugas-tugasnya dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.

Kompeten artinya kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu secara memadai. Orang yang kompeten adalah yang belajar terus menerus dan selalu berhasil dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Harmonis adalah suatu situasi yang menunjukkan sikap saling peduli dan menghargai perbedaan apapun latar belakangnya. Dalam pelayanan, harmonis sangat penting karena semua orang mempunyai kedudukan yang sama, tidak boleh ada diskriminasi. Dengan sikap harmonis, maka akan tercipta lingkungan yang kondusif.

Loyal adalah sikap ASN yang memiliki dedikasi tinggi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. ASN harus memegang teguh ideologi Pancasila, UUD NRI 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara.

Adaptif adalah sikap yang terus menerus menyesuaikan diri dengan perubahan. Bagi ASN, adaptif adalah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. ASN harus cepat menyesuaikan diri, terus berinovasi, kreatif dan proaktif.

Kolaboratif adalah sikap membangun kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak. Di sini tidak ada ego sektoral. ASN harus mampu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Terbuka dalam bekerjasama untuk mendapatkan nilai tambah.

Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila

Melalui penelitian ini responden dan narasumber sependapat bahwa perilaku oleh ASN adalah gambaran citra pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Artinya, bahwa ASN yang melaksanakan tugasnya dengan baik berarti telah melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya perilaku ASN yang tidak baik berarti merusak nilai-nilai Pancasila.

Sampai saat ini BPIP belum mengeluarkan nilai-nilai Pancasila sebagaimana yang dikeluarkan oleh BP7 di jaman Orde Baru. Apabila dicermati secara mendalam, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila yang dihasilkan oleh BP7 masih relevan hingga sekarang.

Core value ASN BerAKHLAK: berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dapat dipandang telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila tersebut di atas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ASN BerAKHLAK adalah ASN yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Pancasila Lestari

Tidak dapat dipungkiri bahwa nilai-nilai Pancasila itu indah. Keindahan tersebut tampak pada adanya toleransi dalam kehidupan beragama termasuk toleransi kepada mereka yang memiliki kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa, menghormati nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan, menghargai musyawarah dan mufakat, serta berusaha mewujudkan keadilan sosial. ASN sebagai garda terdepan dalam pelayanan dengan profesi apapun dan bidang tugas apapun harus mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila akan berdampak pada terganggunya kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau pada tahun 1948 hingga tahun 1965 Pancasila diganggu oleh PKI, maka bentuk gangguan Pancasila di masa depan akan semakin kompleks.

Menurut Herni Susanti dalam tulisannya tentang Pancasila Dalam Era Globalisasi, mengemukakan bahwa, pengaruh masuknya budaya asing di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang diikuti tanpa adanya penyaringan kaidah, merupakan salah satu penyebab semakin terkikisnya nilai-nilai Pancasila dan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Pancasila seakan terlupakan sebagai sebuah dasar negara dan ideologi nasional yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya tindakan dan perilaku masyarakat Indonesia yang jauh dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional bangsa Indonesia.

ASN BerAKHLAK adalah rumusan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apabila ASN konsisten melaksanakan *core value* tersebut berarti telah berperan penting melestarikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perilaku ASN yang demikian akan menjadi contoh bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian maka Pancasila akan tetap lestari di Indonesia. Sehingga ungkapan Indonesia adalah Pancasila dan Pancasila adalah Indonesia akan tetap ada dan hidup dalam sanubari masyarakat Indonesia.

Pancasila akan tetap menjadi dasar negara dilengkapi dengan tiga pilar lainnya yaitu: UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

V. KESIMPULAN

Kesimpulan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Masalah pelestarian nilai-nilai Pancasila pada ASN muda adalah, bahwa para ASN muda hanya menguasai Pancasila secara teori tetapi belum diterapkan dalam pengamalan kehidupan sehari-hari. Pengamalan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa sudah memadai, sedangkan pengamalan sila kedua, ketiga, keempat dan kelima belum memadai. Di kalangan ASN muda sebanyak 15% ragu dan tidak yakin Pancasila bisa bertahan di tengah gempuran ideologi asing. Sebanyak 25% ASN muda ragu-ragu dan tidak yakin bahwa peristiwa G30S tahun 1965 didalangi oleh PKI.
2. Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam pelestarian nilai-nilai Pancasila adalah melalui kegiatan diklat yang masif dengan metode-metode baru sesuai dengan kondisi kekinian. Metode tidak bersifat indoktrinasi sebagaimana yang dilaksanakan oleh BP7 di jaman orde baru.

Saran yang relevan terkait hasil penelitian ini adalah:

1. Diklat selain Latsar CPNS, PKP, PKA, dan PKN perlu memasukkan materi tentang ke-Pancasila-an minimal 10% di dalam kurikulumnya.
2. Diklat wajib ASN 20 jamlat per tahun wajib diisi tentang materi ke-Pancasila-an minimal sebanyak 10% atau 2 jamlat.
3. BPIP perlu segera melaksanakan diklat ke-Pancasila-an dengan sasaran utama para pejabat dan ASN.

DAFTAR PUSTAKA

- Azyumardi Azra. 2012. Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Melenium III. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Dessler, Gary, 2009, Manajemen SDM: buku 1. Jakarta: Indeks
- Erie Sudewo. 2011. *Best Practice Character Building Menuju Indonesia Lebih Baik*. Jakarta. Penerbit Republika.
- George, Bill, 2002. *Authentic Leadership: Rediscovering the Secrets to Creating Lasting Value*, Jossey Bass.
- Hasiara, L. O. (2013). Sikap dan Perilaku Aparatur dalam Melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, University of Muhammadiyah Malang
- Haryatmoko. 2011. *Etika Publik*, Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Herni Susanti, 2019, Pancasila Dalam Era Globalisasi, Jakarta.
- John, Alfred. (1995). *How to Develop a Powerful Personality: Menegakkan Integritas Diri Menyempurnakan Kepribadian*. Terjemahan oleh Ari Kristanti. Surabaya: PORTICO Publishing.
- KPK RI, 2016, *Pembentukan Komite Integritas*, Jakarta.
- KPK RI, 2016, *Pembentukan dan Pengembangan Tunas Integritas Melalui*

- Indonesia Corporate University (I-Corpu)*, Jakarta
LAN RI, *Modul Pelatihan ASN BerAKHLAK*, 2021.
Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi.
Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Nana Rukmana, 2013. *Etika dan Integritas*, Jakarta. SBM Publishing.
PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Raymond W. Cox III. 2009. *Ethics and Integrity in Public Administration*,
M.E. Sharpe, Inc.
Suhadi, Idup, 2006. *Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi
Negara Republik Indonesia.
UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatus Sipil Negara
Yudi Latif. 2011. *Negara Paripurna*, Jakarta. PT. Gramedia.
Yudi Latif, 2011. *Kembalinya Politik Ideologi*, Jakarta, PT. Gramedia
Yudi Latif, 2014. *Mata Air Keteladanan Pancasila*, 2014, PT. Gramedia.